

**Dampak Ketimpangan Akses Transportasi Laut terhadap
Ekonomi dan Konflik Sosial: Studi Kasus Pelabuhan Roro Bengkalis**

Natasya

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia
natasya010305@gmail.com

Saidatul Akmalia

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia
delimagatot02@gmail.com

Saffanah Arta Mevia

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia
saffanahartamevia4@gmail.com

Dea Agustia

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia
deaagustia148@gmail.com

Fakhrurrozi

IAIN Datuk Laksemana Bengkalis, Indonesia
ozimalaya@gmail.com

Abstract

Inequality in access to maritime transportation in Bengkalis Regency, particularly at the Sei Selari and Air Putih Ro-Ro Ports, has created substantial disruptions in the distribution of goods and the socio-economic stability of the community. Heavy dependence on these ports results in prolonged congestion, increased logistical costs, and rising public dissatisfaction. This study aims to comprehensively analyze the functional issues of the Bengkalis Ro-Ro Ports from a social science perspective, focusing on economic dynamics, access inequality, and emerging social conflicts. The research employs a qualitative descriptive method through a literature study that compiles data from previous research, policy documents, and relevant academic sources. The findings show that the limited number of ferry fleets delays goods distribution, damages perishable commodities, increases operational costs, and raises prices of basic necessities. Socially, these conditions trigger demonstrations, tensions among service users, and declining public trust in local authorities, consistent with Ralf Dahrendorf's conflict theory. This study contributes by providing an in-depth analysis of the interrelation between transport access, local economic conditions, and conflict dynamics, while offering strategic recommendations such as fleet expansion, e-ticketing implementation, improved operational management, and the enforcement of fair queueing systems to support socio-economic stability in Bengkalis.

Keywords: Maritime Transportation, Bengkalis Ro-Ro Port, Access Inequality, Local Economy, Social Conflict

Abstrak

Ketimpangan akses transportasi laut di Kabupaten Bengkalis, khususnya pada Pelabuhan Roro Sei Selari dan Air Putih, telah menimbulkan dampak serius terhadap kelancaran distribusi barang dan stabilitas sosial-ekonomi masyarakat. Ketergantungan tinggi terhadap fasilitas penyebrangan ini menyebabkan antrean berkepanjangan, kenaikan biaya logistik, dan memicu ketidakpuasan publik. Penelitian ini bertujuan menganalisis secara komprehensif permasalahan fungsional Pelabuhan Roro Bengkalis dari perspektif ilmu sosial, terutama terkait dinamika ekonomi, ketimpangan akses, dan potensi konflik sosial. Metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literatur yang menghimpun data dari penelitian terdahulu, dokumen kebijakan, dan sumber ilmiah relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterbatasan armada ferry menyebabkan tertundanya distribusi barang, kerusakan komoditas pertanian, peningkatan biaya operasional, dan kenaikan harga kebutuhan pokok. Secara sosial, kondisi ini memicu demonstrasi, ketegangan antar pengguna jasa, serta ketidakpercayaan terhadap pemerintah daerah, sebagaimana dijelaskan melalui teori konflik Ralf Dahrendorf. Kontribusi penelitian ini terletak pada penyediaan analisis mendalam mengenai hubungan antara akses transportasi, ekonomi lokal, dan dinamika konflik, sekaligus menawarkan rekomendasi strategis seperti penambahan armada, penerapan e-ticketing, peningkatan manajemen operasional, dan penegakan prinsip antrean yang adil guna mendukung stabilitas sosial-ekonomi Bengkalis.

Kata Kunci: Transportasi Laut, Roro Bengkalis, Ketimpangan Akses, Ekonomi Lokal, Konflik Sosial

PENDAHULUAN

Akses transportasi merupakan elemen fundamental yang menentukan kelancaran mobilitas penduduk, efektivitas distribusi barang, serta integrasi ekonomi wilayah. Dalam kajian transportasi modern ditegaskan bahwa ketimpangan akses transportasi dapat menghambat rantai pasok dan menurunkan daya saing wilayah. Wilayah yang memiliki akses transportasi terbatas biasanya mengalami stagnasi ekonomi karena konektivitas antarkawasan tidak berjalan optimal (Rodrigue, 2020).

Transport inequality tidak hanya berpengaruh terhadap efisiensi ekonomi, tetapi juga mendorong terbentuknya kesenjangan sosial di masyarakat. Lucas (2012) menekankan bahwa ketidaksetaraan akses transportasi dapat menghasilkan eksklusi sosial, terutama bagi masyarakat kepulauan atau daerah terpencil yang sangat bergantung pada moda transportasi tertentu. Ketika akses tidak merata, peluang ekonomi dan layanan publik menjadi sulit dicapai oleh kelompok masyarakat tertentu (Lucas, 2012).

Dalam konteks transportasi laut, kekurangan armada dan rendahnya kapasitas pelabuhan merupakan hambatan utama yang menyebabkan inefisiensi logistik. Notteboom dan Pallis (2021) menjelaskan bahwa pelayanan pelabuhan yang tidak optimal berdampak pada meningkatnya waktu tunggu, membengkaknya biaya logistik, dan munculnya ketidakpuasan dari pengguna layanan. Hal ini terutama dirasakan pada pelabuhan yang menjadi satu-satunya akses keluar-masuk bagi suatu wilayah (Notteboom & Pallis, 2021).

Indonesia sebagai negara kepulauan sangat bergantung pada transportasi laut untuk menjamin kelancaran mobilitas penduduk dan distribusi logistik antarwilayah. Namun laporan pemerintah menunjukkan adanya kendala struktural seperti keterbatasan armada, rendahnya kualitas infrastruktur pelabuhan, serta manajemen operasional yang belum efisien sehingga menghambat kinerja logistik nasional (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023).

Provinsi Riau termasuk wilayah dengan tingkat ketergantungan tinggi terhadap transportasi laut karena 70% wilayahnya berupa perairan. Pulau Bengkalis menjadi salah satu kawasan penting yang sangat mengandalkan pelabuhan sebagai jalur distribusi utama

menuju Riau daratan. Pelabuhan Roro Sei Selari merupakan simpul vital yang memastikan mobilitas masyarakat dan arus distribusi barang tetap berjalan (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023).

Dalam beberapa tahun terakhir, Pelabuhan Roro Sei Selari mengalami permasalahan kronis berupa keterbatasan armada ferry dan kapasitas pelayanan yang tidak sebanding dengan jumlah pengguna. Kondisi ini menyebabkan antrean kendaraan yang panjang hingga berhari-hari, terutama saat hari libur dan puncak aktivitas ekonomi. Permasalahan ini berdampak langsung pada kelancaran distribusi barang dan aktivitas ekonomi masyarakat (Ferdiansyah, 2022).

Dampak buruk dari keterbatasan transportasi ini tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat umum yang bergantung pada pelabuhan untuk aktivitas keseharian. Melambatnya distribusi barang menyebabkan harga kebutuhan pokok meningkat dan menambah beban ekonomi rumah tangga. Selain itu, pemasok barang harus menanggung biaya tambahan akibat keterlambatan pengiriman (Notteboom & Pallis, 2021).

Penelitian sebelumnya telah banyak membahas permasalahan transportasi laut dan ketimpangan akses pelayanan publik. Ferdiansyah (2022) mengkaji ketimpangan akses pelayanan publik di wilayah kepulauan, sementara Notteboom dan Pallis (2021) menyoroti kemacetan logistik pelabuhan. Lucas (2012) juga menjelaskan bagaimana ketimpangan transportasi dapat memengaruhi kesejahteraan sosial. Namun belum ada penelitian yang menelaah aspek-aspek ini secara spesifik pada konteks Bengkalis (Lucas, 2012; Notteboom & Pallis, 2021; Ferdiansyah, 2022).

Hingga saat ini belum terdapat kajian yang secara langsung menghubungkan permasalahan Pelabuhan Roro Sei Selari dengan ketimpangan akses transportasi, gangguan distribusi ekonomi, dan potensi konflik sosial. Padahal, permasalahan transportasi yang berlarut-larut dapat memicu ketidakpuasan masyarakat dan menurunkan kepercayaan terhadap pemerintah daerah. Minimnya penelitian tersebut menunjukkan adanya kesenjangan akademik yang penting untuk diisi (Ferdiansyah, 2022).

Pendekatan teori konflik Ralf Dahrendorf dapat membantu memahami ketegangan sosial yang muncul akibat ketimpangan layanan transportasi. Dahrendorf menekankan bahwa konflik muncul karena perbedaan kepentingan dan distribusi kekuasaan dalam pengelolaan sumber daya publik. Dalam konteks pelabuhan, pelayanan yang tidak memadai dapat memunculkan tuntutan sosial dan konflik kepentingan antara masyarakat dan pemerintah (Dahrendorf, 1959).

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini merumuskan dua masalah utama. Pertama, bagaimana keterbatasan armada ferry di Pelabuhan Roro Sei Selari memengaruhi kelancaran distribusi barang dan jasa serta aktivitas ekonomi masyarakat Bengkalis. Kedua, bagaimana antrean panjang dan ketimpangan akses transportasi berdampak pada biaya logistik, harga kebutuhan pokok, dan dinamika sosial-ekonomi masyarakat (Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, 2023).

Penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman komprehensif mengenai permasalahan Pelabuhan Roro Bengkalis dari perspektif sosial, ekonomi, dan potensi konflik. Pendekatan ini diharapkan mampu menggambarkan bagaimana ketimpangan transportasi laut berdampak pada aktivitas ekonomi masyarakat sekaligus memengaruhi stabilitas sosial di tingkat lokal (Rodrigue, 2020).

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoretis dalam memperluas kajian mengenai transport inequality, khususnya di wilayah kepulauan. Melalui kajian interdisipliner yang menghubungkan aspek transportasi, ekonomi, dan sosial, penelitian ini

menawarkan pemahaman lebih mendalam mengenai kerentanan sistem transportasi publik di wilayah pesisir. Novelty penelitian ini terletak pada fokus analisis hubungan antara ketimpangan akses transportasi laut, gangguan distribusi ekonomi, dan munculnya konflik sosial dalam konteks wilayah kepulauan seperti Bengkalis. Kajian semacam ini masih jarang dilakukan dan karena itu memberikan nilai tambah dalam literatur transportasi dan studi sosial-ekonomi masyarakat pesisir.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi literatur, yang memungkinkan peneliti menggambarkan fenomena ketimpangan akses transportasi laut secara mendalam berdasarkan sumber-sumber tertulis yang kredibel. Pendekatan deskriptif kualitatif dinilai tepat karena mampu menyajikan analisis komprehensif terhadap konteks sosial, ekonomi, dan pelayanan publik melalui data tekstual yang dianalisis secara sistematis (Creswell & Poth, 2018). Studi literatur digunakan untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan empiris dari penelitian terdahulu serta dokumen kebijakan yang relevan dengan permasalahan Pelabuhan Roro Bengkalis (Snyder, 2019).

Sumber data penelitian ini berasal dari berbagai dokumen akademik dan non-akademik, seperti artikel ilmiah, laporan pemerintah, dokumen kebijakan, serta berita daring. Artikel ilmiah diperoleh dari database seperti Google Scholar dan ScienceDirect untuk memastikan kualitas akademik dan keterkinian literatur. Dokumen kebijakan termasuk laporan resmi Kementerian Perhubungan Republik Indonesia mengenai kinerja transportasi laut dan operasional pelabuhan sebagai sumber data faktual yang kredibel (Kemenhub RI, 2023). Selain itu, berita daring dari media terpercaya digunakan untuk melengkapi gambaran empiris terkait antrean panjang, keterbatasan armada, hingga dampak sosial konflik yang terjadi di Pelabuhan Roro Bengkalis, sebagaimana disarankan oleh Bowen (2009) bahwa dokumen publik dapat digunakan sebagai sumber data yang valid dalam penelitian kualitatif.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui dokumentasi, yaitu proses sistematis dalam menelusuri, memilih, mencatat, dan mengorganisasikan data dari berbagai literatur yang relevan. Dokumentasi merupakan teknik penting dalam penelitian literatur karena memungkinkan peneliti memperoleh beragam informasi tekstual yang dapat dianalisis secara mendalam (Bowen, 2009). Proses ini mencakup identifikasi sumber berdasarkan tema-tema utama seperti keterbatasan armada ferry, dampak ekonomi lokal, logistik maritim, serta dinamika konflik sosial yang berkaitan dengan teori transport inequality dan teori konflik.

Analisis data penelitian ini dilakukan menggunakan model Miles dan Huberman, yang mencakup tiga langkah utama: reduksi data, penyajian data, dan verifikasi atau penarikan kesimpulan. Pada tahap reduksi data, peneliti menyeleksi dan memfokuskan informasi penting sesuai kategori tematik penelitian. Penyajian data dilakukan dengan menyusun narasi analitis yang menggambarkan hubungan antar variabel dan fenomena secara jelas serta runtut. Proses verifikasi dilakukan dengan membandingkan berbagai sumber untuk memperoleh kesimpulan yang konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan (Miles, Huberman, & Saldaña, 2014).

Keabsahan data diperiksa melalui triangulasi sumber dan triangulasi teori. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan informasi dari dokumen pemerintah, artikel ilmiah, hasil penelitian sebelumnya, dan berita daring untuk menguji konsistensi data. Sementara itu, triangulasi teori dilakukan dengan menggunakan berbagai perspektif teoritik, seperti teori transport inequality yang menjelaskan dampak ketimpangan akses (Lucas, 2012; Rodrigue,

2020), teori pelayanan pelabuhan dan logistik maritim (Notteboom & Pallis, 2021), serta teori konflik sosial Ralf Dahrendorf yang relevan dalam membaca dinamika ketegangan akibat ketidakpuasan publik (Swari, 2023). Keabsahan diperkuat melalui ketekunan peneliti dalam melakukan pengecekan silang dan pembacaan mendalam, sebagaimana direkomendasikan dalam penelitian kualitatif kontemporer (Creswell & Creswell, 2018).

PEMBAHASAN

Kota Bengkalis terletak di pulau Bengkalis yang merupakan ibu kota Bengkalis di provinsi Riau yang dimana sebagian besar administrasinya berada dipulau Sumatera. Pulau Bengkalis sendiri selalu ramai dikunjungi Masyarakat dari pulau Sumatera baik itu untuk urusan pemerintahan maupun untuk perizinan instansi pemerintah atau dokumen legal lainnya (Simanulang dkk., 2023). Letak kota Bengkalis sangat strategis, ia terletak pada tepi jalur pelayaran internasional yaitu selat-malaka serta berada pada kawasan segitiga pertumbuhan ekonomi antara Indonesia-Malaysia-Singapura. Bengkalis sendiri memiliki sebuah Pelabuhan Roro yang menghubungkan antara Pulau Bengkalis dengan Riau Daratan. Fungsi utama dari adanya Pelabuhan Roro ini adalah untuk menghubungkan Kota Bengkalis dengan pulau-pulau lainnya. Pelabuhan Roro juga menjadi salah satu penunjang perekonomian masyarakat Bengkalis, perekonomian Bengkalis bisa beranjak naik dan stabil karena adanya Pelabuhan Roro yang berjalan dari hari kehari hingga tahun ketahun.

Namun sangat disayangkan akhir-akhir ini Pelabuhan Roro Bengkalis yaitu Pelabuhan Air Putih dan Pelabuhan Sei Selari mengalami masalah. Yang dimana masalah ini di akibatkan karena kurangnya kesediaan armada kapal ferry dalam penyebrangan. Hal ini membuat masyarakat setempat merasa khawatir akan menyebabkan terhambatnya sistem perekonomian didaerah dan membuat lonjakan harga pada kebutuhan pokok akan meningkat. Biasanya permasalahan Roro ini terjadi pada saat hari raya Idul fitri saja yang dimana hal itu disebabkan karena tingginya antusias masyarakat untuk pulang ke kampung halaman. Namun kali ini berbeda permasalahannya bukan karena perayaan idul fitri melainkan karena kurangnya kesediaan armada kapal sehingga menyebabkan terjadinya antrian panjang dipelabuhan.

Dampak Keterbatasan Armada Ferry terhadap Distribusi Barang dan Aktivitas Ekonomi

Pelabuhan Roro bengkalis merupakan jalur vital dalam pendistribusian barang namun masalah besar dari Pelabuhan ini sendiri adalah kurangnya armada ferry yang ada, hal ini menyebabkan terhambatnya efektifitas oprasional dipelabuhan (Simamora dkk., 2025). Pada beberapa kesempatan hanya ada satu atau dua kapal saja yang melayani penyebrangan. Hal ini menyebabkan terjadinya lonjakan pada bagian antrean penumpang kapal yang dimana para antrean ini harus menunggu waktu yang lama untuk masuk kedalam kapal ada yang berjam-jam hingga berhari-hari (Nurfaris dkk., 2019). Imbas dari antrean panjang ini membuat aktivitas seperti pengiriman barang terkhususnya komoditas pertanian mengalami kerusakan pada saat antrean karena terlalu lama diperjalanan. Kondisi ini tidak hanya menimbulkan keterlambatan tetapi bisa meningkatkan biaya operasional bagi para pelaku usaha yang berujung pada kenaikan harga dilapangan.

Kenaikan harga pada barang bisa terjadi akibat terlalu lamanya pendistribusian barang barang yang disebab-kan permasalahan Roro, sehingga membuat para pelaku usaha menaikkan harga yang luar biasa tinggi terutama pada harga jual pasar dan ini juga akan berimbas pada daya beli masyarakat terutama pada golongan menengah kebawah (Ghofur, 2014). Meningkatnya harga kebutuhan pokok menjadi beban tambahan yang tidak ringan bagi warga masyarakat Bengkalis. Dampak negatif lain yang muncul adalah ketidakpastian dalam

perencanaan logistic hal ini tentunya membuat pengusaha dan pemerintah daerah kesulitan dalam mengatur pendistribusian barang secara efisien. Jika hal ini terus berlanjut maka akan berpengaruh terhadap pertumbuhan pada ekonomi local.

Meski pemerintah daerah dan dinas perhubungan telah berupaya menambah armada serta memperbaiki sistem penyebrangan, keterbatasan pada anggaran dan kendala teknis lainnya masih menjadi hambatan utama dalam masalah Pelabuhan Roro ini. Ketidakpastian dalam perencanaan logistic bisa menghambat perkembangan ekonomi wilayah secara keseluruhan (Rahmadi & Parmadi, 2019). Selain dilihat dari sisi ekonomi kondisi keterbatasan armada kapal pada saat ini bisa membawa dampak terhadap sosial. Para penumpang dan supir mengalami ketidaknyamanan akibat lama nya menunggu di antrean yang bisa memakan waktu hingga belasan jam, situasi ini bisa menimbulkan masalah sosial yang bisa merugikan seluruh pihak.

Kondisi nyata yang terjadi dipelabuhan ini menyebabkan ketidaknyaman dan bisa membuka ruang bagi konflik sosial terjadi akibat munculnya ketimpangan akses serta ketidakpuasan masyarakat terhadap pelayanan pelabuhan. Konflik yang telah terjadi dilapangan seperti adanya demonstrasi yang telah dilakukan oleh para masiswa dan para supir truk juga sebelumnya telah terjadi di Kabupaten Bengkalis, demonstrasi ini menuntut agar pihak pemerintah segera memperbaiki pelayanan dan memberikan solusi yang efektif untuk permasalahan Roro Bengkalis, selain demonstrasi konflik lainnya seperti kerusakan kecil juga kerap kali terjadi akibat adanya penyerobotan antrean yang dilakukan oleh beberapa oknum yang tidak bertanggung jawab. Hal ini jika terus di biarkan akan menimbulkan banyak konflik di masyarakat. Jadi jika dilihat secara menyeluruh keterbatasan armada ferry di Pelabuhan Roro Bengkalis ini memiliki efek yang sangat luas dan bisa mempengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat, baik dari segi ekonomi hingga dinamika sosial. Perbaikan infrastruktur dan pelayanan yang memadai sangat dibutuhkan untuk mendukung kelancaran pendistribusian serta kesejahteraan masyarakat.

Dengan demikian untuk menyelesaikan permasalahan pelabuhan Roro ini memerlukan penanganan yang serius yang dimana ia harus melibatkan seluruh stakeholder, bukan hanya sekedar penambahan armada tetapi juga diperlukan perbaikan dalam manajemen dan pelayanan Pelabuhan agar fungsi vitalnya sebagai penggerak ekonomi dapat berjalan secara optimal.

Dampak Antrian Panjang dan Ketimpangan Akses Transportasi terhadap Biaya, Harga Kebutuhan Pokok, dan Kondisi Sosial Ekonomi di Bengkalis

Dampak dari antrian panjang dan ketimpangan pada akses transportasi di pelabuhan Roro Bengkalis memiliki konsekuensi yang signifikan terutama bagi biaya transportasi, harga pokok, dan juga kondisi sosial ekonomi masyarakat diwilayah Bengkalis sendiri. Antrean yang panjang terjadi akibat adanya keterbatasan pada armada ferry dan juga sistem pelayanan yang kurang optimal sehingga hal itu menyebabkan kendaraan dan penumpang harus menunggu dalam waktu yang sangat lama. Kondisi ini menyebabkan meningkatnya biaya operasional para pelaku usaha dan juga supir truk kendaraan karena waktu tunggu yang lama tentunya menambah penggunaan bahan bakar serta waktu kerja.

Akibat dari meningkatnya biaya transportasi hal ini juga akan berimbas pada harga pokok dipasar local yang juga akan mengalami kenaikan harga. Kenaikan harga ini tentunya akan memengaruhi daya beli masyarakat terutama mereka yang termasuk dalam kelompok ekonomi menengah kebawah sehingga kesejahteraan masyarakat pun menjadi terancam (Muslim dkk., 2023). Selain permasalahan yang terjadi pada aspek ekonomi, ketimpangan

lain pun juga terjadi seperti ketimpangan akses transportasi laut yang dimana ketimpangan ini akan menyebabkan adanya perbedaan yang signifikan dalam kondisi sosial masyarakat Bengkalis.

Konflik yang muncul seperti Demonstrasi, Protes, dan berbagai bentuk ketegangan sosial yang dilakukan masyarakat menjadi wujud nyata dari dinamika konflik terhadap permasalahan Roro itu sendiri. Untuk menangani permasalahan dari Pelabuhan Roro ini diperlukan rancangan yang matang terutama dari pemerintah daerah Kabupaten Bengkalis dan Dinas Perhubungan Kabupaten Bengkalis. Pemerintah Bengkalis bersama Dinas Perhubungan harus mencari jalan keluar yang cepat dan efisien untuk menangani permasalahan Roro ini mengingat masalah ini telah berlangsung cukup lama.

Pemerintah Bengkalis bersama dinas perhubungan harus berkoordinasi dengan instansi pengelola armada kapal, melakukan peningkatan terhadap manajemen operasional, melakukan penambahan armada kapal, pemerintah bisa melakukan penerapan E-Ticketing (Suharyono S, 2024), melakukan perbaikan sistem pelayanan terutama dalam antrean tidak boleh ada yang menyerobot antrean sekalipun itu yang menyerobot adalah anggota pemerintah sendiri ia haruslah tetap mengantri. Tidak boleh ada perlakuan khusus antara anggota pemerintah dengan masyarakat lainnya semua harus disamaratakan. Setelah permasalahan Roro ini teratasi maka kita akan melihat perekonomian masyarakat apakah sudah berangsur kembali normal harga-harga yang ada dipasar. Yang awalnya kenaikan harga ini disebabkan karena permasalahan Roro dan panjangnya antrean Roro yang terjadi namun setelah perbaikan yang telah dilakukan apakah bidang ekonomi akan kembali pulih dan membuat daya beli masyarakat itu sendiri kembali meningkat? Itu adalah tugas besar yang harus pemerintah lihat kedepannya.

Karena pada hakikatnya Ketika permasalahan Pelabuhan Roro telah diatasi dan perekonomian sudah kembali cukup stabil maka tidak menutup kemungkinan bahwa hal ini bisa membangun kepercayaan dan membuat masyarakat mulai dari berbagai kelompok akan mendapatkan representasi yang adil dalam mengelola sumber daya-nya yang ada. Berikut ini adalah beberapa penyelesaian yang bisa dilakukan pemerintah untuk mengatasi permasalahan Roro bengkalis yaitu: 1) Penambahan armada kapal untuk mengurangi antrean panjang sering terjadi akibat kapal yang mengalami perawatn atau berkurang jumlahnya. 2) Penerapan sistem pemesanan tiket elektronik. 3) Perbaikan infrastruktur dan fasilitas pendukung dipelabuhan seperti perbaikan armada, ruang tunggu yang nyaman. 4) Penyamarataan dalam mengantri, tidak ada perlakuan khusus terhadap yang lainnya baik itu antara masyarakat dan anggota pemerintah. 5) Transparansi atau keterbukaan dalam pengelolaan Pelabuhan baik itu Ketika ada masalah atau tidak.

KESIMPULAN

Penelitian ini menegaskan bahwa keterbatasan armada ferry di Pelabuhan Roro Sei Selari dan Air Putih merupakan temuan pokok yang secara langsung memicu antrean berkepanjangan, meningkatnya biaya logistik, kerusakan komoditas pertanian, kenaikan harga kebutuhan pokok, serta munculnya ketegangan sosial seperti demonstrasi dan penurunan kepercayaan publik terhadap pemerintah. Secara teoritik, temuan ini memperkuat perspektif transport inequality dan teori konflik Ralf Dahrendorf yang menjelaskan bahwa ketimpangan akses layanan publik akan mendorong munculnya ketegangan struktural akibat distribusi kekuasaan dan fasilitas yang tidak merata. Dari sisi implikasi praktis kebijakan publik, penelitian ini menekankan bahwa pemerintah daerah perlu melakukan intervensi strategis melalui penambahan armada ferry, optimalisasi manajemen operasional, penegakan

prinsip keadilan antrean, serta penerapan e-ticketing sebagai instrumen efisiensi dan transparansi pelayanan. Meskipun penelitian ini memberikan gambaran komprehensif mengenai hubungan antara akses transportasi, dinamika ekonomi lokal, dan konflik sosial, kajian ini tetap memiliki batasan karena hanya mengandalkan studi literatur tanpa observasi lapangan dan wawancara mendalam, sehingga belum menangkap variasi pengalaman empiris masyarakat secara langsung. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya perlu diarahkan pada studi campuran (mixed methods) atau pendekatan etnografis untuk memetakan pola perilaku pengguna pelabuhan, mengevaluasi efektivitas kebijakan perhubungan yang sudah diterapkan, serta mengembangkan model manajemen transportasi laut yang adaptif bagi wilayah kepulauan seperti Bengkalis sehingga mampu menjawab kebutuhan logistik sekaligus mereduksi potensi konflik sosial di masa depan.

DAFTAR PUSTAKA

- Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (5th ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Poth, C. (2018). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Dahrendorf, R. (1959). *Class and class conflict in industrial society*. Stanford University Press.
- Farid, F., Rahman, A., Raehani, C., & Febrianti, D. (2020). Dinamika kekuasaan dalam perubahan organisasi. *Jurnal Sinar Manajemen*, 7(2), 88–94. <https://doi.org/10.56338/jsm.v7i2.1228>
- Ferdiansyah, F. (2022). Ketimpangan akses pelayanan publik di wilayah kepulauan. *Jurnal Pelayanan Publik*, 8(2), 115–128.
- Ghofur, A. (2014). Problematika pembangunan pulau terluar dan pemberdayaan masyarakat di Kecamatan Rupert Utara Kabupaten Bengkalis. *Media Komunikasi Umat Bergama*, 6(1), 59–80.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja transportasi laut dan pelayanan pelabuhan*. Kementerian Perhubungan RI.
- Kementerian Perhubungan Republik Indonesia. (2023). *Laporan kinerja transportasi laut nasional 2023*. Kementerian Perhubungan RI.
- Lucas, K. (2012). Transport and social exclusion: Where are we now? *Transport Policy*, 20, 105–113. <https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2012.01.013>
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Muslim, M., Muklis, M., Romus, M., Malau, R. H., & Rachmadi, M. (2023). Penguatan nasionalisme melalui aktivitas ekonomi di pulau terluar Indonesia (Studi di Pulau Rupert Kabupaten Bengkalis–Riau). *Jurnal Ilmiah Ekonomi dan Bisnis*, 20(2), 175–184. <https://doi.org/10.31849/jieb.v20i2.16094>
- Notteboom, T., & Pallis, A. (2021). Inevitable port congestion? *Maritime Economics & Logistics*, 23(1), 1–20.
- Notteboom, T., & Pallis, A. (2021). It hits the fan! Supply chain disruptions in the wake of the COVID-19 pandemic. *Maritime Economics & Logistics*, 23(2), 199–210. <https://doi.org/10.1057/s41278-020-00168-7>

- Nurfaris, F., Nasir, M., & Supria, S. (2019). Sistem deteksi jumlah penumpang pejalan kaki di Pelabuhan RoRo Bengkalis. *INOVTEK Polbeng – Seri Informatika*, 4(1), 101. <https://doi.org/10.35314/isi.v4i1.981>
- Rahmadi, S., & Parmadi, P. (2019). Pengaruh ketimpangan pendapatan dan kemiskinan terhadap pertumbuhan ekonomi antar pulau di Indonesia. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 14(2), 55–66. <https://doi.org/10.22437/paradigma.v14i2.6948>
- Rodrigue, J.-P. (2020). *The geography of transport systems* (5th ed.). Routledge. <https://doi.org/10.4324/9780429346323>
- Simamora, W. A., Waloejo, B. S., & Agustin, I. W. (2025). Kinerja pelayanan Pelabuhan Sei Selari Kabupaten Bengkalis. *JURPAS Journal of Urban and Regional Planning Society*, 1(3), 97–104.
- Simanulang, R. C., Bunari, B., & Asril, A. (2023). Perkembangan Kota Bengkalis era reformasi (1998–2020). *JISHUM (Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora) Chronologia*, 4(3), 103–110. <https://doi.org/10.22236/jhe.v4i3.10918>
- Snyder, H. (2019). Literature review as a research methodology: An overview and guidelines. *Journal of Business Research*, 104, 333–339. <https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2019.07.039>
- Suharyono, S. (2024). Pengaruh sistem dan harga terhadap kinerja penerapan e-ticketing di Pelabuhan Roro Bengkalis. *Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 1(12), 379–384. <https://doi.org/10.5281/ZENODO.12784811>
- Swari, P. R. (2023). Budaya patriarki dan tantangan dalam kebebasan berekspresi: Analisis menggunakan Teori Konflik Ralf Dahrendorf. *Jurnal Dinamika Sosial Budaya*, 25(2), 213–218. <https://doi.org/10.26623/jdsb.v25i4.7166>
- Tugiman, D. (2020). History of RO–RO crossgates in the Bengkalis District, 1995–2019. *JOM FKIP*, 7(2), 1–10.